



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Manunggal 22 Kel Maccini Sombala Kec. Tamalate, Makassar

Telepon : (0411) 8112822 Faksimili: (0411) 8112833

E-mail: [bnnpsulsel@yahoo.co.id](mailto:bnnpsulsel@yahoo.co.id)

Website : <http://sulsel.bnn.go.id>

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Nomor : B/2019/XII/Ka/PR.00/2022/BNNP  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen Rencana  
Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Vertikal  
BNN Tahun 2023**

Makassar, 28 Desember 2022

Kepada

Yth. Sekretaris Utama BNN

Cq. Kepala Biro Perencanaan

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  - b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Sadan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - c. Peraturan Kepala Sadan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sadan Narkotika Nasional;
  - d. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Sadan Narkotika Nasional Tahun 2023 Nomor SP DIPA-066.01-0/2023 tanggal 30 November 2022;
  - e. Sekretaris Utama SNN Nomor S/4259/XII/SU/PR.01.01/2022/SNN tanggal 19 Desember 2022 Perihal Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Vertikal BNN Tahun 2023;
  - f. Surat Sekretaris Utama BNN Nomor: B/4231/XII/RO/PR.01.01/2022/BNN Tanggal Desember 2022 Perihal Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Vertikal BNN Tahun 2022.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami emailkan Penyusunan/Pemutakhiran Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Kerja Vertikal BNN Tahun 2022.
3. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Sulawesi Selatan

**KEPALA**

Drs. Ghil Prawijaya, M.Th

**Tembusan:**

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dokumen perencanaan kinerja yang harus dimiliki tiap satuan kerja yang memuat sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024. Badan Narkotika Nasional (BNN) khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai institusi yang memperoleh mandat untuk menanggulangi permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dalam negeri, maka BNN Provinsi Sulawesi Selatan harus mampu mewujudkannya demi terlindunginya masyarakat dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkotika.

Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Renstra BNN 2020-2024 sesuai arahan Presiden Republik Indonesia periode 2020-2024. Diharapkan konstruksi Rencana Kinerja Tahunan yang disusun dapat mewujudkan sasaran dan program kerja BNN yang telah ditetapkan pada Renstra BNN.

Banyak pihak yang terlibat dalam tertuangnya Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 ini, oleh karenanya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu sehingga dokumen ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin kedepannya.

Kepala BNN

Provinsi Sulawesi Selatan



Drs. Ghiri Prawijaya, M. Th

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. KONDISI UMUM**

#### **1. Permasalahan**

Provinsi Sulawesi Selatan secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dan pertumbuhan terpesat di Indonesia yang terdiri dari 3 ( Tiga ) kota dan 21 ( Dua Puluh Satu ) kabupaten serta memiliki bandar udara dan beberapa pelabuhan laut lainnya. Kondisi demikian menjadikan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki akses / pintu masuk yang sangat terbuka baik dari negara lain maupun provinsi yang berbatasan langsung dengannya, sehingga memudahkan bagi lalu lintas orang maupun barang. Pada sisi yang positif kondisi ini telah memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi dan pembangunan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi pada sisi yang lain berdampak kepada pertumbuhan berbagai kejahatan, baik yang bersifat konvensional maupun *Transnational Crime* (Kejahatan Antar Lintas Negara maupun Provinsi), seperti halnya penyelundupan dan peredaran gelap Narkoba. Memperhatikan posisi strategis dan kondisi wilayah yang sebagian besar berbatasan langsung dengan perairan, dapat dijadikan penghubung masuknya narkotika dari negara tetangga ke provinsi lainnya dilanjutkan ke provinsi Sulawesi Selatan melalui jalur laut karena banyaknya pelabuhan tikus / tidak resmi di Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, maka dapat diprediksi saat ini dan waktu ke depan Provinsi Sulawesi Selatan masih akan tetap menjadi tujuan dan tempat penyelundupan dan peredaran gelap Narkotika.

Dalam rangka menyikapi permasalahan narkotika yang dari waktu ke waktu semakin mengkhawatirkan dengan modus yang mengikuti perkembangan zaman, maka BNN Provinsi Sulawesi Selatan berupaya memperbaharui pendekatan penanganannya dengan menyesuaikan Rencana Strategis BNN RI Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam dokumen Rencana Program Kerja BNN Provinsi Kepulauan Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Tahunan 2023.

## 2. Hasil Evaluasi

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja BNN Provinsi Sulawesi Selatan sebagai dasar proyeksi rencana kinerja BNN Provinsi Sulawesi Selatan ditahun mendatang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program kerja BNN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022. Sesuai anggaran Tahun 2022, BNN Provinsi Sulawesi Selatan mengelola anggaran sebesar Rp 9.875.703.000,- ( Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Limah Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah) yang terdiri dari anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN sebesar Rp. 7.370.584.000,- ( Tujuh Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah ) dan anggaran Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebesar Rp 2.505.119.000,- ( Dua Miliar Lima Ratus Lima Juta Seratus Sembilan Belas Ribu Rupiah ). Sampai dengan akhir bulan Desember 2022, capaian realisasi anggaran BNN Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp 9.786.792,117 (Sembilan Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Belas Rupiah) atau sebesar 99,10% untuk mendukung 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya BNN dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Capaian kinerja BNN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dengan 17 (tujuh) sasaran strategis dan 17 ( Tujuh Belas ) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BNN BNN Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil evaluasi seperti tabel berikut:

<b>NO</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan ( IKK)</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>Capaian ( % )</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori tinggi di wilayah Provinsi	51	52	<b>101%</b>
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan	78,67	82,946	<b>105%</b>

	terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Narkoba berkategori “tinggi” di wilayah Provinsi			
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah Provinsi	3,2	3,2	<b>100</b>
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di Wilayah Provinsi yang beralih status dari “Bahaya “ menjadi “Waspada”	1	1	100
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang di Intervensi	2,99	2,99	<b>100</b>
6	Meningkatnya Kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 orang	6	<b>120</b>
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	25 Orang	25	<b>100</b>
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) di Wilayah Provinsi	8 Lembaga	8	<b>100</b>
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat ( IBM ) di Wilayah Provinsi	8 Unit	8	<b>100</b>
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi	3,4 Indeks	3,5	102,94
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanam terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	15 Perkara	28	186,7
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 Indeks	100	100
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	100 Indeks	100	100
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	88 Indeks		
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	3 Kabupaten/Kota	3	100
16	Meningkatnya tat kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator pelaksanaan anggaran ( IKPA)	95 Indeks	95	100
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/kota di Wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	3 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten /Kota	100

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN BNN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023**

Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan rencana kinerja Tahun 2023 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2023. Rencana kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di wilayah provinsi bersama seluruh jajaran unit kerja BNN Kabupaten/Kota. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan BNN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	<b>3 Lembaga</b>	<b>250.000.000</b>
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	<b>5 Keluarga</b>	<b>110.000.000</b>
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di Wilayah Provinsi	<b>2 Lembaga</b>	<b>248.782.000</b>
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	<b>1 Kelompok Masyarakat</b>	<b>112.000.000</b>
			Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)		
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	<b>5 Orang</b>	<b>24.230.000</b>



NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	asi Instansi Pemerintah		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	<b>25 Orang</b>	<b>215.000.000</b>
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi	<b>13 Lembaga</b>	<b>96.410.000</b>
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi	<b>2 Lembaga</b>	<b>177.830.000</b>
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP	<b>50 Orang</b>	<b>32.560.000</b>
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	<b>1 Laporan</b>	<b>50.000.000</b>
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	<b>15 Perkara</b>	<b>800.000.000</b>
9.	Pengawasan Tahanan	Meningkatnya pengawasan tahanan dan	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan	<b>23 Orang</b>	<b>186.205.000</b>

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
	dan Barang Bukti	barang bukti narkotika	kesehatan tahanan		
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	<b>2 Produk</b>	<b>47.245.000</b>
			Jumlah Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika	<b>70 Orang</b>	<b>161.650.000</b>
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkotika	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	0
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNNP	<b>2 Dokumen</b>	<b>43.562.000</b>
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	<b>3 BNNK</b>	-
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP	<b>95</b>	<b>5.333.381.000</b>
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	<b>3 BNNK</b>	-

\*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Provinsi

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan BNN Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 merupakan rincian dari Rencana Program Jangka Menengah BNN Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan gambaran arah program kerja dan orientasi kinerja BNN Provinsi dan jajarannya selama satu tahun. Dokumen rencana kinerja tahunan ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja anggaran seluruh unit kerja di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, serta dokumen ini juga dapat dilakukan penyesuaian dikemudian hari apabila terdapat kebijakan atau faktor-faktor yang mengharuskan dilakukan penyesuaian adaptasi kebijakan terkait.

**Lampiran**  
**Matrik Rencana Volume Rincian Output**  
**Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan**  
**Tahun 2023**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>KINERJA</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi		SMP dan SMU Sederajat yang Memperoleh Pengembangan <i>Soft Skill</i>	3 Lembaga
2.	Penyelenggaraan Advokasi	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi		Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5 Keluarga
				Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	2 Desa
3.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di Wilayah Provinsi		Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga
4.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	1. Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari “Bahaya” menjadi “Waspada” 2. Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi *)		Fasilitasi Program Alternative Development pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	1 Kelompok Masyarakat

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KEGIATAN</b>	<b>KINERJA</b>	<b>KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT</b>	<b>RENCANA VOLUME</b>
5.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih		Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	5 Orang
		Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis		Tenaga rehabilitasi yg diberikan peningkatan kompetensi teknis	25 Orang
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	1. Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Provinsi 2. Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNP		Lembaga rehabilitasi yang operasional	10 Lembaga
				Layanan rehabilitasi di Klinik BNNP	50 Orang
				Layanan Pemeriksaan Psikologi	5 Orang
				Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	221 Orang
		Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Provinsi		Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	2 Lembaga
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan*)		Laporan Informasi Intelijen Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	1 Laporan
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21		Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	15 Berkas
		Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya*)		Operasi Pemusnahan Titik Lokasi Lahan Tanaman Narkotika (Unit Vertikal)	

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT	RENCANA VOLUME
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan		Layanan pengawasan dan pengelolaan barang bukti narkoba dan non-narkoba (Unit Vertikal)	2 Produk
		Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba		Layanan pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana narkoba, prekursor narkoba dan TPPU (Unit Vertikal)	23 Orang
				Jumlah Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkoba	70 Orang
10.	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Narkoba	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21*)		Berkas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang hasil Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba Yang Ditangani BNNP	-
11.	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	1. Nilai Kinerja Anggaran BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1 Dokumen
				Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen
12.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNNP 2. Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target		Layanan Manajemen Keuangan	1 Dokumen
				Layanan Perkantoran	12 Layanan